



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 Januari 2023
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf ME, ST., MI.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2022. 2. Persiapan pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2023. 3. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 44 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim, Mendikbudristek RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dibuka pada pukul 10.26 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf, ME, ST., MI.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Evaluasi Program Kerja TA 2022

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN TA 2022 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 95,73% atau sebesar **Rp.81.299.815.000.000,-** (*Delapan puluh satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta rupiah*) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar 95,35% atau sebesar **Rp.80.971.108.000.000,-** (*Delapan puluh triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar seratus delapan juta rupiah*); **dari pagu harian sebesar Rp.84.922.819.000.000,-** (*Delapan puluh empat triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta rupiah*).
2. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI agar capaian setiap program dan kerja disampaikan tidak hanya data kuantitatif namun dikaitkan dengan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
3. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI bahwa dalam penyediaan platform digital seharusnya sudah didasari suatu kajian, data penelitian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)), terutama platform merdeka mengajar yang memerlukan kajian tersendiri mengenai kebutuhan setiap jenjang pendidikan (PAUD s/d SMK dan SLB) beserta proses asesmennya.

B. Persiapan Program Kerja TA 2023

Mengenai persiapan pelaksanaan program kerja TA 2023, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk berkomitmen mengarahkan implementasi program prioritas nasional dan pembiayaannya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana amanat Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Terkait usulan pembiayaan pendidikan yang dialihkan melalui penggunaan dana LPDP sebagai konsekuensi adanya *automatic adjustment*, Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat simulasi penambahan dana yang akan dialokasikan untuk PIP, KIP Kuliah dan percepatan pemenuhan program prioritas lainnya.
3. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI mengawal pelaksanaan DAK Fisik dan DAK NonFisik TA 2023 bidang pendidikan sebesar Rp.128 triliun, berdasarkan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Komisi X DPR RI.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI cq Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbudristek RI antara lain, PIP dan program prioritas dalam kebijakan merdeka belajar Tahun Anggaran 2023. Serta menyampaikan laporan hasil investigasi pelaksanaan program kerja TA 2020 s/d TA 2022 serta langkah penyelesaiannya.

5. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dan melaporkan setiap perubahan anggaran secara berkala (per 3 (tiga) bulan) termasuk setiap adanya *automatic adjustment*.

C. Lain-Lain

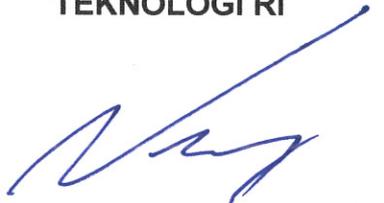
1. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI menuntaskan pengangkatan guru yang lulus PPPK dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen Guru PPPK pada tahun 2023, serta memberikan laporan perkembangannya secara berkala kepada Komisi X DPR RI.
2. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI memperbaiki pola komunikasi dan respon dengan mitra kerjanya, serta secara aktif membuka forum diskusi kepada komunitas dan pemangku kepentingan bidang pendidikan.
3. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat langkah strategis terkait layanan penanganan secara cepat terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan/kesusilaan seksual, atau intoleransi di satuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
4. Komisi X DPR RI mendorong pemenuhan kebutuhan sarpras IT pendidikan antara lain alat permainan edukatif (APE) dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran IT pendidikan, dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pendidikan karakter dan meningkatkan literasi digital peserta didik.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan penyebaran SMK Pusat Keunggulan, penyediaan guru produktif, dan kerja sama dengan DUDI serta keselarasan dengan prodi yang dibutuhkan di daerah.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI memberikan data pelaksanaan program prioritas nasional dan program prioritas Kemendikbudristek RI di daerah pemilihan, secara berkala (per 3 (tiga) bulan).
7. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek memberikan DIPA TA 2023 paling lambat tanggal 7 Februari 2023.

D. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data dari pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI, paling lambat tanggal 7 Februari 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.37 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT,



Dr. Dede Yusuf ME, ST., MI.Pol.